

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Desak Anies Pecat Pejabat Balela

### Tak Becus Rencanakan Anggaran

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan memecat anak buahnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlebih bagi mereka yang balela (membangkang) dan tak bisa menganggarkan kebutuhan bidang masing-masing. Alhasil, draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 menjadi janggal.

"Saya meminta Gubernur Anies Baswedan mencopot anak buahnya di SKPD yang tak becus menganggarkan kebutuhan bidang masing-masing," ungkap Prasetyo Edi Marsudi, ketua DPRD DKI Jakarta kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan, terdapat beberapa pengajuan anggaran dalam draf KUA-PPAS 2020 yang oleh banyak pihak dirasa ganjil. Misalnya, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian database sebesar Rp12 miliar dan anggaran untuk influencer Rp5 miliar.

Teranyar, sambung Prasetyo, dan yang paling bikin ramai adalah anggaran yang diajukan dinas pendidikan untuk pembelian lem aibon sebesar Rp82 miliar dan pulpen Rp123 miliar. "Kayak masalah aibonlah, terus masalah influencer. Kalau SKPDnya enggak mampu, ganti orangnya," tandas dia.

Menurut Prasetyo, alasan anak buah Anies dalam kesalahannya itu hanya cara untuk mengelak dari desakan publik. "Namanya juga manusia. Pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis," imbuh dia.

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana juga mengkritik banyaknya kejanggalan usulan dalam KUA-PPAS untuk rancangan anggaran dan pendapatan daerah (RAPBD) DKI 2020 itu.

Pasalnya, William menemukan sejumlah usulan anggaran yang nilainya fantastis. Anggaran untuk Dinas Pendidikan yang diusulkan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat misalnya, ada usulan anggaran sebesar Rp82 miliar untuk pembelian lem aibon.

Dengan munculnya berbagai kejanggalan itu, William menilai Gubernur Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli dengan proses penyusunan anggaran yang berlangsung.

"Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah," ungkap dia kepada INDOPOS, Rabu (30/10/2019).

William mengatakan, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Dinas Pendidikan juga menganggarkan pembelian 7313 unit komputer dan beberapa unit server senilai Rp121 miliar. PSI juga menemukan anggaran Rp66 miliar untuk storage di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. William lalu menyinggung tidak transparannya Pemrov DKI terkait proses penyusunan anggaran tersebut.

Ia mendesak Gubernur Anies membuka akses bagi publik untuk melihat anggaran yang diusulkan. "Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak," kata dia.

"Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," tutur William.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, ungunya anggota DPRD DKI Jakarta cermat mengawasi anggaran.

"Iya, dong (DPRD harus cermat-red), uang berapa pun anggaran, derwan harus cermat, dan anggaran tepat sasaran," ucap dia kepada INDOPOS di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Dia menuturkan, DPRD memiliki fungsi penyusunan anggaran. Sehingga, pasti ada usulan anggaran yang harus dikritik. "Memang bersifat sementara. Di situ lah fungsinya penganggaran DPRD untuk kritis. Tidak ada yang luar biasa cuma memang kecermatan, dan ketelitian van input itu," ucap dia.

Menurut Inggard, wajar bila ada perubahan anggaran untuk lem buat alat tulis kantor sebesar Rp22 miliar. DPRD harus membahas perubahan itu agar menjadi anggaran pasti. "Itulah namanya PPAS. Bisa dilakukan pendalaman pembahasan supaya menjadi yang fix berapa. Wajar saja. Dilakukan pengurangan juga harus kajian lagi dong," tutur dia.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkecil hati bahwa anggaran itu sifatnya sementara untuk diubah setelah mendapat rencana anggaran pihak sekolah. "Menyangkut soal dana lem aibon saya sudah coba sisir, Insha Allah tidak ada anggaran untuk lem aibon sebesar Rp82 miliar," Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefulloh Hidayat, Rabu (30/10/2019).

Perlu diketahui, Pemprov DKI melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, membuat anggaran untuk membeli

lem aibon dengan total biaya tersebut. KUA-PPAS ini di buka melalui portal situs resmi penyedia data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI, apbd.jakarta.go.id.

Dalam situs tersebut dituliskan, lem aibon itu dianggarkan untuk 37.500 orang. Harga satuannya disebutkan sejumlah Rp 184.000. Pengadaan lem aibon ini untuk 12 bulan atau 1 tahun.

Saefulloh menambahkan, anggaran yang tertulis dalam lem aibon itu merupakan anggaran sementara yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. Dan menurut dia, anggaran itu merupakan anggaran untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah yang ada di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Kemudian, kata Saefulloh, anggaran itu terkena revisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk kebutuhan pemenuhan alat tulis kantor. "Kalau belanja alat tulis kantor yang disitu komponen Aibon jumlahnya mencapai Rp 82 miliar, sebenarnya hanya Rp 22 miliar," ujarnya.

Syaefuloh menyebut data itu telah diubah untuk dibahas dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama Komisi E. "Artinya, secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen Aibon tidak ada dan kita akan lakukan penyesuaian. Data penyesuaian sudah ada," ucap dia.

Mengomentari hal itu, Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengatakan, Dinas Pendidikan seperti tidak cermat dalam menyusun dan mengajukan anggaran. Seharusnya, harus logis mengusulkan setiap belanja daerah. "Usulan anggaran untuk lem aibon sudah dihilangkan atau dicoret sejak awal di internal," kata dia.

Dia berharap, ada tindakan teguran dari Gubernur Anies Baswedan kepada Dinas Pendidikan. Termasuk mempertanyakan alasan anggaran tersebut diajukan pada KUA PPAS tahun 2020 mendatang. "Harus ditolak dan menghapus anggaran lem aibon ini karena merupakan pemborosan anggaran," tandasnya. (aen/dny)